

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH

Miftahul Huda

Jurusan Manajemen Informatika STMIK PRINGSEWU Lampung

Jl. Wisma Rini No. 09 PRINGSEWU Lampung

website: www.stmikPRINGSEWU.ac.id

E-mail : miftahulh870@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Di lain pihak, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat, tepat dan akurat. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengembangkan konsep e-Government yang baik (good governance), Dengan sarana infrastruktur yang telah tersedia dan permasalahan administrasi dan potensi desa yang perlu mendapatkan perhatian serius, mendorong penulis untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada dengan mengisi konten / membangun aplikasi yang bersifat e-Government. Seringnya permintaan data tentang perangkat desa dan potensi desa oleh para pimpinan instansi pemerintahan yang lebih tinggi, yang dilakukan secara manual tidak menutup kemungkinan data-data yang disampaikan kurang akurat ataupun kurang cepat, lagi pula adanya potensi-potensi desa yang belum optimal serta terjadinya perubahan data-data di desa perlu mendapatkan perhatian yang serius semua pihak. Penulis melakukan penelitian dengan membangun aplikasi web yang bertema “Penerapan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Desa Bandung Baru Kecamatan. Adiluwih”.

Kata Kunci: E-Government, Good governance, Desa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah. Hal ini sudah menjadi kebutuhan khusus dari masyarakat di Indonesia untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga seorang pemimpin pemerintahan mampu mengelola tata pemerintahan secara baik pula. Berangkat dari hal tersebut, selama ini masyarakat sering memandang negative terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karna berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa dari pada pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah memiliki pemimpin pemerintahan yang dapat menciptakan good governance, dimana pemerintah mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan suasana yang memungkinkan kreatifitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa di payungi oleh pemimpinnya. Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintahan di semua tingkatan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih mengfokuskan pada pemerintahan desa. Sebab dari masyarakat desa sendiri belum merasakan pelayanan secara baik dari

pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Karna pemerintahan desa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan public pelayan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Selain itu, untuk menciptakan pemerintahan desa yang dapat mengelola tata pemerintahan yang baik (good governance) seorang pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan pegawai. Hal ini dapat memperbaiki dari segi sistem pola rekrutmen dalam jabatan harus di benahi, karna untuk merubah sistem birokrasi yang selama ini cenderung birokratis, inefisien, lamban, sering menyalah gunakan wewenang, serta penuh Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) menjadi lebih bersih. sehubungan dengan pernyataan di atas, pola hubungan selama ini menempatkan atasan dan bawahan sebagai suatu tingkatan yang kaku dan kurang nya komunikasi dan kordinasi. Pemerintahan yang seperti ini harus dirubah dalam pemerintahan desa untuk tetap mendapat pengakuan dari masyarakat desa sebagai tata pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di

tingkat desa (study kasus di desa Bandung Baru Kecamatan. Adiluwih Kabupaten. Pringsewu)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pemerintahan desa agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?

1.3 Batasan Masalah

1. Apresiasi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas wawasan penulis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Bahan masukan dan pemikiran bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada tingkat Desa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
3. Bagi masyarakat desa diharapkan dapat menambah informasi ataupun pengetahuan tentang tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian E-Government

2.1.1 E-Government

E-government secara umum adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Secara konseptual, *e-Government (e-Gov)* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, didalamnya melibatkan otomisasi dan komputersasi pada prosedur paper-based yang akan mendorong cara baru dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan menyampaikan informasi (Pascual, 2003). Pengembangan *e-Gov* dilakukan dalam rangka mencapai *good government*, yang menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai layanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Di tingkat nasional, inisiatif penerapan *e-Gov* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Penerapan *e-Gov* di lembaga pemerintah mengacu kepada fase pengembangan *e-Gov* secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah mencakup (Inpres No. 3 Tahun 2003):

1. Fase persiapan, yaitu:

- pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga
- pendidikan dan pelatihan SDM
- penyediaan sarana akses public
- sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal
- pengembangan *e-leadership* dan *awareness building*, serta
- penyiapan peraturan pendukung

2. Fase pematangan, yaitu

- pembuatan situs informasi layanan publik interaktif
- pembuatan *hyperlink*.

3. Fase pemantapan, yaitu:

- penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik
- penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (*interoperabilitas*).

4. Fase pemanfaatan, yaitu:

- pembuatan berbagai aplikasi untuk layanan G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi
- pengembangan proses layanan *e-Gov* yang efektif dan efisien
- penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

2.1.2 Good governance

Good governance dapat dilihat dari pemahaman yang dimiliki baik oleh IMF maupun World Bank yang melihat *Good Governance* sebagai sebuah cara untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dari pemerintah”. Hal ini menurut mereka adalah bagaimana memperkuat aturan hukum dan prediktibilitas serta imparialitas dari penegakannya. Ini juga berarti mencabut akar dari korupsi dan aktivitas-aktivitas rent seeking, yang dapat dilakukan melalui transparansi dan aliran informasi serta menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi pemerintah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi manajemen dari dana yang berasal dari masyarakat (Kurniawan, 2006).

Sepuluh Prinsip Good Governance adalah :

1. **KUNTABILITAS:** Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. **PENGAWASAN :** Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. **DAYA TANGGAP:** Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. **PROFESIONALISME:** Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. **EFISIENSI & EFEKTIVITAS:** Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. **TRANSPARANSI:** Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. **KESETARAAN:** Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. **WAWASAN KE DEPAN:** Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam

seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

9. **PARTISIPASI:** Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. **PENEGAKAN HUKUM:** Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2.1.3 Definisi Desa

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2012:114) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” mengemukakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. Sedangkan menurut Mujiharjo (2008:93) dalam bukunya yang berjudul “Pengetahuan Sosial Geografi 3” mengemukakan bahwa: “Desa diartikan sebagai satu kesatuan hukumdimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang masih memegang teguh unsur adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhurnya dan mempunyai system pemerintahan sendiri, terletak di wilayah kecamatan dan di pimpin oleh kepala desa”

2.2 Komponen E-government

2.2.1 DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang menggunakan notasi – notasi (symbol-simbol) untuk menggambarkan arus data. Data flow diagram sering di gunakan untuk menggambarkan suatu system yang telah ada atau system yang baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir. Jogianto HM, (Analisis dan Disain system informasi pendekatan terstruktur,1989;) dalam jurnal azwar syarif (2009).

2.2.2 ER Diagram

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek - objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk memodelkan struktur dan menggambarkan data dan hubungan

antar data tersebut menggunakan beberapa notasi dan symbol. (ER Diagram 2009) dalam Jurnal Emi Ratna Setiani, Jajang Kusnendar, Eka Widhi yunarso (2010).

2.2.3 PHP

Bahasa pemrograman yang di gunakan dalam aplikasi ini salah satunya adalah PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah server-side embedded script language artinya sintaks - sintaks dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa (materi PHP 2009) dalam jurnal Emi Ratna Setiani, Jajang Kusnendar, Eka Widhi Yunarso,(2010)

2.2.4 HTML

HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah bahasa yang digunakan untuk membuat suatu situs *web* atau *homepage*. Setiap dokumen dalam *web* di tulis dalam format HTML. Semua format dokumen, *hyperlink* yang dapat di klik, gambar, dokumen, multimedia, form yang dapat diisi dan sebagainya didasarkan atas HTML (Muhamad 2009), dalam jurnal Wanda Lestari, ismail, Ahmad Suryan (2011)

2.2.5 MYSQL

MySQL merupakan *software* yang tergolong *database server* dan bersifat *open source*. *Open source* menyatakan bahwa *software* ini dilengkapi dengan *source* (kode yang dipakai untuk membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk *executabelnya* atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa diperoleh dengan cara mengunduh di internet secara gratis. Hal menarik lainnya adalah MySQL juga bersifat *multiflatform*. MySQL dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi (Kadir, Membuat Aplikasi Web dengan PHP dan Database MySQL, 2009) dalam jurnal Wanda Lestari, ismail, Ahmad Suryan (2011)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Observasi

Menurut Nasution “observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan” Sugiyono (2009:226). Penulis melakukan pengamatan terhadap data yang diteliti, melakukan interview dengan pihak pihak yang berkaitan dengan pembuatan system informasi untuk mengoptimalkan sistem informasi pemerintahan berbasis web ini.

3.2 Dokumentasi

“Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang” Sugiyono (2009:329). Penulis meminta langsung dokumen dari Desa Bandung baru untuk kelengkapan data.

3.3 Wawancara

Menurut Esterberg “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik” Sugiyono (2009:233).

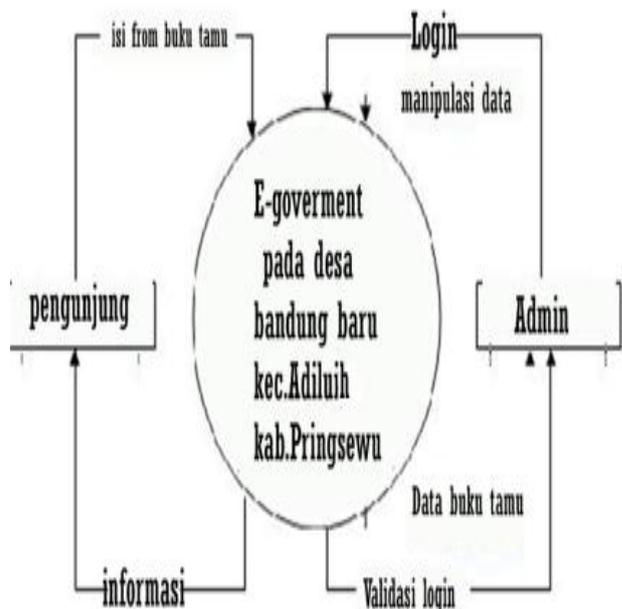
3.4 Studi Pustaka

“Studi Pustaka adalah buku-buku atau majalah yang menunjang dalam suatu penelitian” (pedoman penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dan Jurnal STMIK Pringsewu, 2015). Didapat juga melalui informasi lain baik melalui majalah bahkan melalui internet.

4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan suatu sistem beserta seluruh eksternal entity yang terlibat dalam sistem yang disertai dengan aliran data yang digunakan atau diperlukan (hanya terlibat satu proses).



Gambar 4.1. Diagram Konteks

4.2 DFD level 0

DFD level 0 (Diagram Flow Diagram level 0) merupakan diagram yang menggambarkan seluruh proses yang ada di *diagram konteks*, seluruh *aksternal entity* dan seluruh proses yang ada dalam sistem (terlibat lebih dari satu proses).



4.6.1 Implementasi Halaman Home



Gambar 4.6.4 Implementasi Halaman Gallery

4.6.2 Implementasi Halaman Berita

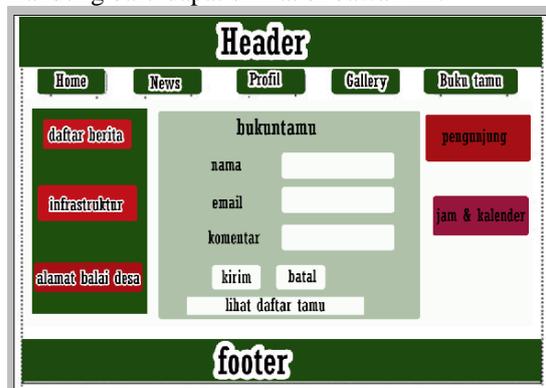
Halaman menu berita berisi tentang berita-berita terbaru khususnya di Desa Bandung baru. Rancangan menu berita dalam E-Government pada Desa Bandung baru dapat dilihat di bawah ini:



4.6.2. Implementasi Halaman Berita

4.6.5 Implementasi Halaman Buku Tamu

Halaman menu buku tamu berisi tentang komentar pengunjung. Rancangan tampilan halaman menu buku tamu dalam E-Government pada Desa Bandung baru dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.6.5 Implementasi Halaman Buku Tamu

4.6.3 Implementasi Halaman Profil

Halaman profil berisi tentang sejarah singkat terbentuknya Desa Bandung baru, struktur pemerintahan, dan letak geografis Desa Bandung baru. Rancangan menu profil dalam E-Government pada Desa Bandung baru.



Gambar 4.6.3 Implementasi Halaman Profil

4.6.4 Implementasi Halaman Gallery

Halaman menu gallery berisi tentang foto-foto kegiatan warga Desa Bandung Baru. Rancangan menu profil E-Government pada Desa Bandung baru dapat dilihat di bawah ini:

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah terciptanya sistem baru E-Government pada Desa Bandung Baru yaitu sistem yang ingin memberikan Good governance di Desa Bandung Baru, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berbagai permasalahan mengenai Good governance, yang belum memiliki akses yang cukup luas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya E-Government pada Desa Bandung Baru, maka wilayah area promosinya menjadi sangat luas, waktu untuk mendapatkan informasi mengenai Desa Bandung Baru akan lebih cepat, mudah dan efisien.
2. Sistem informasinya sudah memiliki akses yang cukup luas, sehingga dalam penyampaian informasinya tidak terbatas dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke Desa Bandung Baru.
3. Dengan adanya E-Government pada Desa Bandung Baru, dapat mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Desa Bandung Baru terhadap

masyarakat setempat dan masyarakat luas pada umumnya.

5.2 Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Perlunya operator khusus yang bertugas untuk menangani pengoperasian komputer, khususnya program internet dan dapat memahami tentang sistem informasi E Government berbasis web.
2. Perlunya disediakan ruang khusus yang nyaman untuk admin yang akan digunakan dalam pengoperasian.
3. Agar keamanan sistem lebih terjamin maka perlu penggunaan password dan pergantian password secara berkala agar sistem ini tidak mudah dirusak oleh orang lain.
4. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar sistem yang telah dibangun bermanfaat sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem ini.
5. Perlunya digunakan akses melalui berbagai macam bentuk media komunikasi seperti PC, Tablet, dan Handphone dalam merancang atau mendesain website dan untuk memudahkan para pengguna dalam mencari informasi dimanapun dan kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Syarif (2009) dengan jurnal Perancangan system informasi berbasis web dengan menggunakan PHP & MYSQL.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang *Telematika (Telekomunikasi, Media & Informatika)*, 2001, Jakarta.
- Islamiyatun. (2014). *Jurnal (E-Government Pada Pekon Kresnomulyo)*. STMIK Pringsewu
- Jumadi Simangunsong, *Pengembangan E-Government Di Indonesia*, Jurusan Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta 2010
- Nirmala Husada Bhramita Vidya. (2014). *Jurnal (E-Government Pada Desa PIRNGADI)*. STMIK Pringsewu
- Pengertian Desa Menurut beberapa para ahli (di akses pada 28 Oktober 2012) <http://texbuk.blogspot.com/2012/02/pengertian-desa-menurut-beberapa-para.html#ixzz2AsqpZ48C>

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama

Sulistiyono, Bambang. 2013. Skripsi (E-Government Pada Pekon Gumukmas). STMIK Pringsewu

Sugiyono. (2009:329). *Pengertian Dokumentasi*

Sugiyono. (2009:226). *Pengertian Observasi*

<http://beritagratis.blogspot.com/2009/10/penerapan-good-governance-di-indonesia.html>